

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

**2.1.1 Penelitian Terdahulu Terkait Penggabungan dan Pemekaran
Desa/Kelurahan**

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Penggabungan dan Pemekaran Desa/Kelurahan					
1	Darmi Saleh Harahap	Penggabungan Desa Salese, Desa Panaungan dan Sihaborgoan menjadi Desa Panaungan ditinjau menurut Permendagri No. 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penggabungan, Penghapusan dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan	Sosiologis/Empiris	proses pembentukan dan penggabungan Desa Salese, Desa Panaungan dan Desa Sihaborgoan menjadi satu desa sebelum memenuhi syarat dan ketentuan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Permendagri Nomor 28	31 Agustus 2016

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Penggabungan dan Pemekaran Desa/Kelurahan					
				<p>Tahun 2006 tentang Pembentukan , Penggabungan, Penghapusan Perubahan status Desa menjadi Kelurahan, Perda Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan , Penggabungan dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan. Permasalahan yang terdapat dalam artikel ini dikarenakan pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tidak pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat</p>	

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Penggabungan dan Pemekaran Desa/Kelurahan					
				<p>dan tidak melibatkan masyarakat dalam seluruh proses penggabungan Desa, penetapan Desa yang tidak melibatkan masyarakat, batas-batas desa sampai saat ini belum dikukuhkan dalam peta batas Desa di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan</p> <p>Jumlah penduduk yang belum memenuhi syarat yaitu 1000 jiwa atau 200 KK, Penyediaan perangkat, sarana dan prasaran yang belum memadai. Kemudian permasalahan diperparah dengan akses</p>	

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Penggabungan dan Pemekaran Desa/Kelurahan					
				antar desa yang sulit dijangkau dan pelayanan pemerintahan Desa yang. Belum memenuhi standar	
2	Irvan Rizky Hutomo	Eksistensi Tanah Bengko Pasca Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan	Yuridis Normatif	Artikel ini mendeskripsikan Tanah bengkok yang sebelumnya berfungsi sebagai ladang untuk	Vol 02 No. 01 Tahun 2021

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Penggabungan dan Pemekaran Desa/Kelurahan					
		an Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan di Kabupaten Kendal		memperoleh penghasilan tetap khususnya bagi sekretaris desa sebelum diangkat menjadi PNS menjadi tanah kas desa dan merupakan kekayaan desa. Tanah bengkok menjadi kekayaan desa untuk dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat desa. Hak penguasaan atas tanah bengkok berada ditangan desa. Perlindungan hukum yang diberikan untuk menjaga marwah eksistensi	

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Penggabungan dan Pemekaran Desa/Kelurahan					
				<p>tanah bengkok selain Perda Kendal tentang Perubahan Kedua atas Perda Kendal 10/2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa. Di sisi lain tanah bengkok merupakan aset desa dan tanah kas desa berdasar Permen 4/2007 yang digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat desa. Wujud nyata dari perlindungan hukum bagi tanah bengkok yaitu penyalanggunaan fungsi tanah bengkok</p>	

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Penggabungan dan Pemekaran Desa/Kelurahan					
				yang dilakukan oleh perangkat desa ialah tindak pidana korupsi.	
3	Dr. Drs. H. Rahyunir Rauf, M.Si.	Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa Melalui Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Desa	Yuridis Normatif	Artikel ini mendeskripsikan dalam UU No 6 Tahun 2014 diatur dengan jelas tentang pembentukan, penggabungan dan penghapusan Desa, sehingga proses pembentukan, penggabungan dan penghapusan Desa diperbolehkan oleh UU tentang Desa, serta diatur juga tentang perubahan status dari Kelurahan menjadi Desa, yang selama ini tidak ada	Vol. II Nomor 1 Oktober 2016

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Penggabungan dan Pemekaran Desa/Kelurahan					
				<p>pengaturan tentang perubahan Kelurahan menjadi Desa, hanya pengaturan perubahan status dari Desa menjadi Kelurahan. Dalam upaya penguatan kelembagaan pemerintahan Desa makan pemerintah dan pemerintah Daerah dapat melakuakn proses pembentukan , penggabungan dan penghapusan Desa, sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah lebih efisien dan efektif.</p>	

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Penggabungan dan Pemekaran Desa/Kelurahan					
4	Citra Firmadhani	Efektivitas Penggabungan Kelurahan Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kelurahan Nunang Daya Bangun Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat	Kualitatif Deskriptif	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan efektivitas penggabungan kelurahan dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Kelurahan Nunang Daya Bangun Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh. Untuk menganalisis efektivitas penggabungan kelurahan digunakan teori William N. Dunn yang mana memperhatikan dua faktor yaitu harapan masyarakat dan realisasi kebijakan. Penelitian ini	Vol. 1, No. 1, Oktober 2019

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Penggabungan dan Pemekaran Desa/Kelurahan					
				<p>menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ditemukan bahwa penggabungan kelurahan belum efektif. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor penghambat, yaitu kelurahan tidak memiliki SOP, kurangnya jumlah aparatur kelurahan, berkurangnya dana operasional kelurahan dan ada beberapa masyarakat yang belum mengetahui tentang penggabungan kelurahan.</p>	

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Penggabungan dan Pemekaran Desa/Kelurahan					
5	Sudarsana	Pemekaran Desa Sebagai Upaya Peningkatan Efisiensi Pelayanan Publik	Kualitatif Deskriptif	<p>Penelitian ini menjelaskan mengenai pembentukan desa baru diluar desa yang telah ada atau sebagai akibat pemekaran desa atau penataan desa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan persyaratan, mekanisme dan tata cara pemekaran desa sesuai dengan Peraturan Daerah kabupaten Pacitan No 4 Tahun 2008, desa Ketrow “memenuhi” syarat dan layak untuk dimekarkan menuju desa mandiri menjadi empat desa</p>	Volume 10, Nomor 1 Halaman 47-66

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Penggabungan dan Pemekaran Desa/Kelurahan					
				<p>yaitu, desa induk/definitif bernama desa Ketro, sedangkan desa pemekaran/persiapan bernama desa Ketro Asri, desa Sempurejo dan desa Pelemrejo. Sedangkan, desa Wonosidi, Kecamatan Tulakan juga memenuhi syarat dan layak untuk dimekarkan menuju desa mandiri menjadi dua desa yaitu desa induk/definitif, dan desa pemekaran/persiapan bernama desa Wonosari. Akibat dari pemekaran desa merupakan</p>	

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Penggabungan dan Pemekaran Desa/Kelurahan					
				tanggung jawab desa yang bersangkutan dan pemerintah daerah dapat melakukan regulasi tentang pemekaran desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
6	Erwin Fakhrol Alim	Evaluasi Proses Implementasi Kebijakan Penggabungan Kelurahan di Kota Pekalongan	Kualitatif Deskriptif	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi proses implementasi kebijakan penggabungan kelurahan di Kota Pekalongan. Metode penelitian ini deskriptif analitis melalui pendekatan kualitatif. asil dari penelitian	Vol 8, No 04 (2019)

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Penggabungan dan Pemekaran Desa/Kelurahan					
				<p>menunjukkan bahwa implementasi dari kebijakan penggabungan kelurahan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan ini berjalan dengan lancar walaupun ditemukan beberapa hambatan. Tujuan yang ingin di capai dari kebijakan ini juga sudah ada yang tercapai yaitu efisiensi anggaran. Efisiensi yang dimaksud adalah dengan adanya penggabungan Kelurahan maka jumlah anggaran operasional dan belanja</p>	

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Penggabungan dan Pemekaran Desa/Kelurahan					
				pegawai kelurahan yang dibutuhkan menjadi lebih sedikit dan sarana prasarana pendukung yang dibutuhkan lebih sedikit.	
7	Novia kristianti	Implikasi Kebijakan Penggabungan Kelurahan Tahun 2015-2016 Terhadap Dinamika Sosial dan Politik di Kota Pekalongan	Kualitatif Deskriptif	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi kebijakan penggabungan kelurahan terhadap dinamika sosial dan politik di Kota Pekalongan. Tipe penelitian ini adalah deskriptif analitis melalui pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implikasi dari kebijakan	

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Penggabungan dan Pemekaran Desa/Kelurahan					
				<p>penggabungan kelurahan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan ini melahirkan konflik vertikal maupun horizontal, hal terbesar disebabkan karena kebijakan penggabungan kelurahan di Kota Pekalongan berdampak padaperubahan nomenklatur daerah. Perubahan nomenklatur dianggap menghilangkan sejarah oleh masyarakat Kota Pekalongan yang sangat menjunjung tinggi nilai kebudayaan.</p>	

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Penggabungan dan Pemekaran Desa/Kelurahan					
8	Olivier Sykes, Andreas Schulze Baing	Regional and territorial development policy after the 2016 EU referendum – Initial reflections and some tentative scenarios	Deskriptif Kualitatif	penelitian ini menunjukkan akan pentingnya peran kebijakan regional Uni Eropa di kawasan dan komunitas Inggris, serta menyerukan perhatian yang lebih besar pada tahun-tahun mendatang terhadap dampak distribusi teritorial dari keluarnya Inggris dari Uni Eropa.	Local Economy 2017, Vol. 32(3) 240–256 2017
9	Sebastian Blesse & Felix Roesel	Merging county administrations – cross-national evidence of fiscal and political effects	Deskriptif Kualitatif	penelitian ini menilai dampak fiskal dan politik dari penggabungan daerah dalam dua lingkungan kelembagaan yang berbeda: kabupaten bertindak secara otonom	ISSN: 0300-3930 23 Jul 2018

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Penggabungan dan Pemekaran Desa/Kelurahan					
				<p>sebagai pemerintah daerah tingkat atas (Jerman), atau kabupaten sebagai cabang pemerintahan negara bagian yang terdesentralisasi (Austria). Penelitian ini menyimpulkan bahwa biaya politik jelas lebih besar daripada manfaat fiskal dari reformasi penggabungan daerah – terlepas dari kondisi kelembagaan yang mendasarinya .</p>	

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Penggabungan dan Pemekaran Desa/Kelurahan					
10	Falk Ebinger, Sabine Kuhlmann & Joerg Bogumil	Territorial reforms in Europe: effects on administrative performance and democratic participation	Deskriptif Kualitatif	penelitian ini memiliki kontribusi memberikan gambaran umum mengenai reformasi teritorial di Eropa, dengan fokus khusus pada Jerman Timur sebagai contoh yang menjanjikan untuk perbandingan antar negara. kemudian memberikan gambaran umum mengenai klasifikasi analitis reformasi-reformasi tersebut dan faktor-faktor konteks yang perlu dipertimbangkan dalam evaluasinya. Dan menganalisis literatur mengenai	ISSN: 0300-3930 05 November 2018

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Penggabungan dan Pemekaran Desa/Kelurahan					
				dampak kinerja kualitatif dari reformasi ini. Hasilnya menunjukkan bahwa reformasi teritorial mempunyai dampak positif yang signifikan terhadap kinerja fungsional, sementara dampaknya terhadap partisipasi dan integrasi memang bersifat ambivalen.	
1 1	Paweł Swianiewicz & Katarzyna Szmigiel-Rawska	Why some local governments choose not to free-ride when undergoing boundary reform: a study of two merger cases in Poland	Mix Method	Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang menjelaskan mengapa perilaku kota-kota yang akan digabungkan berbeda dari hasil penelitian sebelumnya. Temuan yang paling	ISSN: 0300-3930 12 Mei 2020

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Penggabungan dan Pemekaran Desa/Kelurahan					
				penting adalah bahwa mekanisme yang mencegah penimbunan sumber daya bersama akan efektif ketika peraturan lokal diterapkan pada merger.	

2.1.2 Penelitian Terdahulu Terkait Implementasi Kebijakan

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
1	Widya Surya Cendekiana, Andi Darmawansya, Muhammad Nur Iqbal Nurdin	Government Policy Implementation Regarding Covid-19 in Makassar	Hukum Normatif	Artikel in membahas tentang kebijakan pemda kota yang dituju terkait Covid-19 serta kebijakan yang dikeluarkan pemerintah hingga tingkat daerah. Hasil penelitian memaparka	28 November 2022

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
				<p>n kebijakan dalam upaya penanganan Covid-19 dalam peraturan pemerintah di tingkat daerah khususnya di Kota Makassar yang bertujuan untuk mencegah penularan Covid-19. penerapan peraturan pemerintah daerah telah menyadarkan masyarakat akan pentingnya memakai masker, salah satunya tertuang dalam isi peraturan protokol kesehatan. metode yang</p>	

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
				digunakan dalam penelitian ini yakni hukum normatif.	
2	Alber Tanjung, Salma Yetti, Aldri Frinaldi, Syamsir	Implementasi Kebijakan Pendidikan terhadap Kebijakan Publik	Literature Review	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pendidikan terhadap kebijakan publik dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan dan kebijakan publik saling terkait dan memiliki hubungan yang erat. kebijakan pendidikan merupakan salah satu bentuk	29 April 2024

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
				kebijakan publik yang dihasilkan oleh pemerintah dan institusi publik untuk mengatur dan memajukan sistem pendidikan dan institusi publik untuk mengatur dan memajukan sistem pendidikan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pendidikan tertentu. penelitian ini menggunakan metode literatur review.	

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
3	Darol Arkum, Widya Handini, Risky Kurniawan	Optimalisasi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Pangkalpinang	Deskriptif Kualitatif	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Pangkalpinang dilaksanakan dan mencari solusi untuk optimalisasi implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Pangkalpinang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di kota Pangkalpinang telah	Desember 2023

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
				<p>dilaksanakan namun keterlibatan masyarakat dalam implementasi kebijakan masih kurang dikarenakan komunikasi yang kurang antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dengan masyarakat sebagai penerima manfaat kebijakan tersebut. penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.</p>	

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
4	Elisa Putri Kholifa, Farid Setiawan, Nurul Lahdilah Fitri	Implemen tasi Kebijak an Pendidik an	Pengu mpula n dan Penelit ian	Artikel ini mendeskripsikan Implementasi kebijakan Pendidikan adalah rangkaian kegiatan yang saling berkaitan dengan keadministrasian sebagai pertanggung jawaban dari pelaksanaan sebuah program yang di dalamnya mengandalkan kebijakan. Proses dari implementasi Pendidikan saling terkait antara satu factor dengan factor lain, seperti factor politik, sosial,	Juli 2022

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
				<p>hukum dan ekonomi yang baik secara langsung atau tidak akan mempengaruhi tingkah laku berbagai pihak pelaksana program. Dalam pelaksanaannya implementasi perlu diperhatikan prosesnya, perlu dipertimbangkan strategi serta pendekatan yang digunakan, tahapan perumusan, kecukupan serta kelengkapan dari administrasi. metode yang</p>	

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
				digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data penelitian terutama dari buku dan artikel yang berkaitan dengan "Implementasi Kebijakan Pendidikan".	
5	Ayunda Nabila Mauliddia dan Diana Hertati	Implementasi Kebijakan Perlindungan Kekerasan Seksual	Deskriptif Kualitatif	Penelitian ini menemukan bahwa bahwa Isi Kebijakan dan kontek kebijakan dalam perlindungan perempuan korban kekerasan seksual di Kabupaten Sidoarjo dapat dikatakan optimal	Vol.14, No.3, 2023

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
				<p>dan dijalankan sesuai dengan isi kebijakan dan konteks yang telah ditetapkan. Sehingga secara keseluruhan implementasi kebijakan perlindungan perempuan korban kekerasan seksual di Kabupaten Sidoarjo telah dilakukan dengan baik dan optimal.</p>	
6	Dhanang Ksatrio Witjaksono, Sri Wibani	Implementasi Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Parkir	Deskriptif Kualitatif	Penelitian ini menganalisis enam faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan menurut	Vol 13, No.01 2022

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
				<p>Van Meter dan Van Horn diantaranya adalah 1) Tujuan kebijakan dan standar yang jelas, 2) Sumber daya, 3) Kualitas hubungan interorganisasional, 4) Karakteristik lembaga/organisasi pelaksana, 5) Lingkungan politik, sosial, dan ekonomi, 6) Disposisi/anggapan atau sikap para pelaksana. Dalam kesimpulannya, implementasi kebijakan kerja sama pengelolaan parkir di</p>	

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
				Kabupaten Sidoarjo telah membawa dampak positif dalam beberapa aspek, seperti penerapan teknologi elektronik parkir dan peningkatan perputaran ekonomi. Namun terdapat tantangan dalam hal koordinasi, interpretasi tujuan kebijakan, dan hubungan antarinstansi yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan untuk mencapai hasil yang lebih optimal.	

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
7	Elvira Mulya Nalien	Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Bureaucratic Trimming di Pemerintah Kota Bukittinggi	Kualitatif	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih jauh faktor-faktor yang menghambat daripada implementasi Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi khususnya di Pemerintah Kota Bukittinggi .</p> <p>Merupakan penelitian kualitatif dimana metode pengumpulan data primer dengan cara wawancara mendalam dan observasi partisipasi pasif. hasil dari penelitian</p>	30 Juni 2021

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
				<p>ini didapatkan bahwa belum adanya petunjuk teknis sebagai pedoman untuk melakukan Penyesuaian Sistem Kerja, Pemerintah Kota Bukittinggi masih menunggu arahan lebih lanjut terutama dari Kementerian Dalam Negeri yang bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.</p>	

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
8	Alexander Kevin Tjoanto, Maria R.U.D. Tambunan	Tantangan dan Strategi dalam Proses Implementasi Kebijakan Pajak Karbon	Kualitatif	<p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai faktor yang dapat memberikan tantangan dalam proses implementasi kebijakan pajak karbon di Indonesia dan strategi yang dapat digunakan Pemerintah Indonesia untuk mengatasi tantangan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan data dikumpulkan dengan melakukan tinjauan literatur.</p> <p>Hasil</p>	30 Desember 2022

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
				<p>penelitian menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi pemerintah dalam proses implementasi kebijakan pajak karbon di Indonesia dapat disebabkan oleh faktor sistem politik dan tata kelola lembaga pemerintahan, pengaruh bisnis dan ekonomi, dan penolakan publik. Tantangan tersebut dapat diatasi dengan menggunakan strategi implementasi kebijakan</p>	

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
				<p>secara bertahap dan pembangunan koalisi yang mendukung kebijakan tersebut, pengelolaan pendapatan secara tepat, dan yang paling penting menjadikan kebijakan pajak karbon sebagai bagian dari bauran kebijakan agar dapat mengatasi permasalahan iklim dengan cepat dan mencapai dekarbonisasi jangka panjang.</p>	
9	Anggara Setya Saputra, Suryoto, Chamid Sutikno	Implementasi Kebijakan Penanggulangan	Deskriptif Kualitatif	Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan	Desember 2022

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
		Stunting di Kabupaten Purbalingga		bagaimana proses implementasi kebijakan dilakukan dari sisi aturan, pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan, organisasi pelaksana kebijakan dan analisis lingkungan yang mempengaruhi proses pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini mencoba melihat proses implementasi kebijakan dari sisi bottom up dimana peran masyarakat	

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
				<p>dan kelompok organisasi terlibat secara aktif dalam pelaksanaan kebijakan terkait dengan penanggulangan stunting di Kabupaten Purbalingga.</p> <p>Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan sumber informan, teknik triangulasi data, dan teknik analisis data. Hasil penelitian dilihat dari temuan studi ini didasarkan pada skenario kebijakan yang</p>	

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
				diidealkan di mana inisiatif pencegahan stunting Kabupaten Purbalingga mengikuti pedoman yang digariskan dalam peraturan daerah dan keputusan bupati.	
10	Susni Andriyani, Ariyanti	Implementasi Kebijakan Keterbukaan dan Informasi Publik di Dinas Komunikasi Informatika Kota Palembang	Kualitatif	Penelitian ini memperhatikan kesesuaian kondisi di lapangan dengan teori Edward III dimana sebuah implementasi kebijakan harus memenuhi empat faktor yaitu : komunikasi, sumber daya,	September 2023

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
				disposisi dan struktur birokrasi. Namun meskipun tidak semua faktor implementasi kebijakan terpenuhi petugas selalu mengupayakan untuk memenuhi kebutuhan informasi publik masyarakat Kota Palembang yang dapat dilihat dengan adanya update secara berkala melalui media sosial. penelitian ini adalah penelitian kualitatif.	
1 1	Abd. Wahid, Suardi Mukhlis, Nirwana	Implementasi Kebijakan	Deskriptif	Penelitian ini bertujuan	Juni 2023

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
		an Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) Kabupaten Sinjai	Kualitatif	untuk mengetahui implementasi kebijakan Implementasi Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukk	

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
				<p>an bahwa implementasi kebijakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender telah dilaksanakan namun belum maksimal. Hal ini karena sumber daya, sikap/kecenderungan, serta karakteristik agen pelaksana kurang memahami kebijakan ini, serta komunikasi antara organisasi masih kurang.</p>	

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
1 2	Miftahul Aziz, Esty Asriyana Suryana	Komparasi dan Implementasi Kebijakan Digitalisasi Pertanian : Peluang dan Tantangan		Penelitian ini memiliki tujuan yang komprehensif, yaitu: 1) mengidentifikasi berbagai kebijakan pemerintah yang mendukung implementasi digitalisasi pertanian, 2) melakukan analisis mendalam terhadap besarnya peluang yang ditawarkan oleh digitalisasi pertanian dengan mempertimbangkan potensi serta hambatan yang ada, dan 3) memberika	Vol. 10 No. 3 Desember 2023: 179-198

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
				n rekomendasi kebijakan untuk perkembangan digitalisasi pertanian. Melalui analisis menyeluruh terhadap beragam kebijakan dan inisiatif yang telah ada, tinjauan ini berhasil mengidentifikasi strategi-strategi yang sukses dalam mendorong digitalisasi pertanian.	
13	Dimas Agustian, Marthen Patiung, Yoakin Rembu, Muhammad Nur, Samsul Ode, Surya Yudha Regif	Network Governance dalam Implementasi Kebijakan Ketahan	analisis social network theory (Klijn & Kopenjan)	Tujuan penelitian ini yakni mengalisis governance network dalam jaringan implement	Vol 14, No 1 (2023)

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
		an Pangan		asi kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Timor Tengah Utara yang mana dalam proses pelaksanaanya terjadi interaksi antar banyak aktor dalam jaringan kebijakan ketahanan pangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis social network theory (Klijn & Kopenjan) yang melihat struktur dalam jaringan implementasi	

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
				<p>kebijakannya yakni aspek kontak, kepercayaan, sharing informasi, pertukaran sumber daya. Hasil penelitian bahwa implementasi kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Timor Tengah Utara melalui jaringan governance network bahwa permasalahan pangan dapat dideteksi secara cepat berdasarkan cakupan wilayah. Kesimpulan bahwa dalam jaringan implementasi</p>	

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
				<p>asi kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Timor Tengah Utara berdasarkan aspek kontak yaitu menetapkan organisasi dan tata kerja, kepercayaan yaitu Dinas Pertanian Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang pertanian.</p>	
14	Boniface Oyugi, Zilper Audi-Poquillon, Sally Kendall, Stephen Peckham, Edwine Barasa	The policy formulation process, and the role of actors in the policy	Kualitatif Eksplorasi	Penelitian ini menggunakan studi kualitatif eksplorasi. Peneliti menemukan bahwa prioritas	januari 2024

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
		formulation and implementation process: A policy analysis of the Kenyan free maternity policy		kebijakan tersebut terutama untuk memenuhi agenda kampanye politik tetapi juga menyelaraskan mereka dengan tujuan instrumen penuntun hukum dan kebijakan negara dan tujuan global SDG yang berupaya meningkatkan kualitas perawatan ibu dan bayi baru lahir serta menghilangkan hambatan keuangan. Kebijakan tersebut juga berupaya untuk meningkatkan akses	

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
				<p>ke kehadiran kelahiran yang terampil (SBA), dan desain ulangnya memenuhi tantangan terhadap kebijakan sebelumnya</p> <p>a. Para pemangku kepentingan (birokrat, badan profesi, publik dan mitra pembangunan) mempengaruhi proses perumusan dan isi kebijakan melalui kekuatan mereka untuk mengedepankan dan mengadvokasi ide-ide spesifik melalui isu-isu yang</p>	

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
				dibingkai dalam politik dan konteks sosial ekonomi.	
1 5	Saira Tariq, Rubeena Zakir	Evidence – Informed Policy Formulation and Implementation: A Case Study of 'Clean Air Policy' in Punjab, Pakistan	Kualitatif Empiris	penelitian ini bertujuan untuk penelitian ini adalah untuk menyelidiki persepsi pembuat kebijakan tentang 'bukti' dan bagaimana hal itu dikumpulkan dan digunakan dalam perumusan kebijakan dan proses implementasi. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data empiris.	2015

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
				<p>Studi ini berkontribusi untuk memahami arena praktik kebijakan Informasi berbasis Bukti di Pakistan. Mengatasi tantangan yang disorot dapat menginformasikan strategi untuk meningkatkan penggunaan bukti dalam proses kebijakan untuk meningkatkan kinerja sistem kesehatan.</p>	

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
1 6	Asya Zhelyazkova, Eva Thomann, Eva Ruffing & Sebastiaan Princen	Differentiated policy implementation in the European Union		Penelitian ini menganalisis pola, penyebab, dan konsekuensi Penerapan Kebijakan yang Berbeda (DPI) di Uni Eropa (UE). DPI adalah istilah umum untuk keragaman dalam kehadiran dan penggunaan kebijaksanaan selama proses dan hasil implementasi kebijakan hukum dan praktis di UE. Agenda penelitian DPI yang muncul menekankan	2024

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
				<p>diferensiasi dalam implementasi kebijakan Uni Eropa di luar kepatuhan hukum belaka, yang lebih luas, dan perannya dalam proses politik dan kebijakan yang lebih luas dari pemerintah multilevel Uni Eropa. Kontribusi tersebut menyoroti implementasi yang diantisipasi sebagai salah satu dimensi DPI, serta implementasi hukum dan praktis. DPI berfungsi sebagai alternatif untuk</p>	

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
				differentiated integration (DI), mengakomodasi preferensi, kapasitas, dan kondisi nasional yang heterogen, dan memasukkan kembali ke dalam pembuatan kebijakan UE. Dampak DPI terhadap legitimasi dan efektivitas keluaran UE bergantung pada kondisi ruang lingkup yang memerlukan perhatian lebih ilmiah.	

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
17	Jarot Prianggoro, Agus Subianto, Sri Umiyati, Lunariana Lubis	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sungai Brantas Kota Surabaya Pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur	Kualitatif	Hasil penelitian sebagai berikut bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sungai Brantas di hilir Kota Surabaya yang meliputi pencegahan pencemaran akibat pembuangan sampah dan air limbah belum optimal sehingga perlu adanya keterpaduan sinergi dan kolaborasi yang baik antar stakeholder dalam rangka mencapai tujuan implement	22 Mei 2022

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
				asi kebijakan. Teori Merillee S. Grindle yang digunakan dalam penelitian ini dalam mendefinis ikan keberhasilan n implement asi kebijakan adalah Isi Kebijakan dan Konteks Implement asi. Penelitian ini menggunak an metode kualitatif dengan teknik studi kasus dalam pengumpul an datanya melalui wawancara , observasi dan dokumenta si. Analisis	

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
				data dilakukan secara interaktif dan dikembangkan dengan teknik triangulasi	
18	Rizal Bahroni, Margaretha Rumbekwan, Arwanto Harimas Ginting	Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Usaha Mikro Kecil Berbasis Onlien Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) di Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur	Deskriptif Kualitatif	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui pendekatan induktif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pelayanan perizinan usaha mikro kecil berbasis Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) berdasarkan	Vol. 12, No. 1, Mei 2022

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
				<p>n implementasi kebijakan menurut teori Van Meter dan Van Horn di Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pelayanan perizinan usaha mikro kecil berbasis OSS RBA di Kabupaten Situbondo terlaksana dengan cukup baik. Pernyataan ini didasarkan terhadap tidak ditemukan nya permasalahan</p>	

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
				an yang sangat berarti terhadap pelaksanaan kebijakan serta badan pelaksana dan pelaku usaha merespon positif dan sangat mendukung terhadap kebijakan perizinan berbasis OSS RBA.	
19	Rik Peeters, Cesar Rentería, Guillermo M. Cejudo	How information capacity shapes policy implementation: A comparison of administrative burdens in COVID-19 vaccination programs in the	Deskriptif Kualitatif	Melalui studi kasus komparatif komparatif terhadap program vaksinasi COVID-19 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Belanda, penelitian ini mempelajari bagaimana kapasitas informasi pemerintah	2023

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
		United States, Mexico, and the Netherlands		- kapasitas untuk mengumpulkan dan memproses informasi mengenai warga negara, bisnis, dan wilayah - menyusun beban administratif bagi warga negara. Kami mengembangkan tipologi model kapasitas informasi (infrastruktur, sistem per sistem, dan ad hoc) dan menjelaskan bagaimana pengaruhnya terhadap implementasi kebijakan. penelitian ini menunjukk	

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
				<p>an bagaimana model infrastruktur paling siap untuk menyerap beban administratif bagi sebagian besar warga negara, sementara model sistem per sistem dan terutama model ad hoc cenderung mendorong cenderung membebankan biaya kepada para pekerja garis depan dan warga negara. Namun, meskipun kapasitas informasi dapat membantu kemampuan</p>	

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
				n implementasi kebijakan di luar kendali langsung politisi dan pembuat kebijakan, pemerintah masih dapat membuat pilihan pilihan yang disengaja untuk mengurangi dampak negatifnya dengan mengatur fleksibilitas dan kebijaksanaan operasional .	
20	Eduardo Silva	The politics of policy implementation and reform: Chile's environmental		Makalah ini mengkaji dampak kebijakan dari organisasi gerakan sosial dalam	2023

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
		impact assessment system		konflik atas mega proyek pembangunan, dengan fokus pada keterkaitan antara politik implementasi kebijakan dan upaya reformasi selanjutnya . Saya berargumen tentang kegunaan pendekatan ekonomi politik komparatif untuk mengurai hubungan konteks struktural dengan faktor-faktor spesifik gerakan, seperti organisasi gerakan, strategi, dan taktik, untuk menjelaskan	

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
				<p>n dampak kebijakan dari gerakan. Hal ini membantu untuk menentukan kondisi sistemik, jangka menengah dan jangka pendek secara lebih sistemik, jangka menengah dan jangka panjang secara lebih ketat, dan yang lebih penting, bagaimana hal tersebut mempengaruhi keseimbangan kekuatan antara gerakan dan kekuatan sosial-ekonomi</p>	

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
				<p>dan politik yang berlawanan . Saya menguji proposisi-proposisi ini dalam kasus politik implementasi kebijakan dan bagaimana pengaruhnya terhadap upaya-upaya untuk mereformasi Sistem Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (SEIA) Chili dari tahun 1994 hingga sekarang. sekarang. Dalam kondisi struktural yang berubah, organisasi, strategi, dan taktik</p>	

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
				gerakan dampak pada hasil: hasil positif yang dimediasi oleh sekutu politik dalam kondisi yang menguntungkan, dan dampak tidak langsung tidak langsung dalam kondisi yang tidak menguntungkan ketika para politisi yang bersekutu gagal rancangan undang-undang yang tidak sesuai dengan kepentingan mereka di dalam komite.	

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
21	Angelo Baglioni	Monetary policy implementation: Which "new normal" ?		Artikel ini memberikan sebuah model sederhana dari implementasi kebijakan moneter, menganalisis kedua suku bunga (IRS) dan kebijakan pelonggaran kuantitatif (QE). Model ini menunjukkan bahwa "floor system" yang diperkenalkan dengan kebijakan QE, lebih baik daripada "sistem koridor" tradisional untuk karena dua alasan. Pertama, sistem ini memberikan	2024

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
				<p>n bank sentral satu tingkat kebebasan lebih, karena suku suku bunga dan kebijakan neraca menjadi dua instrumen yang independen . Kedua, ini meningkatkan kemampuan bank sentral untuk menjaga suku bunga pasar uang sesuai dengan tingkat target mereka. Prediksi kedua ini kedua ini dikonfirmasi oleh analisis empiris dari pasar uang di kawasan</p>	

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
				euro. Oleh karena itu, kebijakan moneter dalam "new normal" harus diimplementasikan dengan mengarahkan tingkat suku bunga dalam sistem floor, alih-alih mengandalkan sistem koridor yang digunakan dalam kerangka kerja IRS yang lama	
2 2	Erik Soderberg, Roy Liff	Reframing practice through policy implementation projects in different knowledge contexts		Proyek-proyek implementasi kebijakan dalam organisasi sektor publik semakin penting dalam dua dekade	2023

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
				<p>terakhir dekade terakhir, namun para pembuat kebijakan mengalami kesulitan untuk mempengaruhi praktik-praktik dalam organisasi rumah. Penelitian ini mempelajari bagaimana niat di balik kebijakan kesehatan masyarakat mempengaruhi dua konteks sekolah yang berbeda, yaitu guru dan staf dapur. Para aktor menginterpretasikan maksud</p>	

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
				<p>pembuat kebijakan terkait dengan konteks pengetahuan mereka yang berbeda dengan cara yang berbeda dan dengan hasil yang berbeda untuk proyek implementasi kebijakan. Kami menganalisis alasan dari temuan ini dengan menggunakan konsep penyelarasan kerangka kerja (frame alignment). Pembuat kebijakan mencoba menggunakan upaya ideologis</p>	

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
				<p>dan instrumental dalam mbingkai ulang praktik (dalam kedua konteks). Kami menemukan konsekuensi negatif dari ketidakmampuan untuk menggunakan upaya instrumental. Kami juga menemukan kesulitan dalam menegakkan syarat-syarat sebuah proyek, terutama karena interaksi tatap muka yang sensitif dalam interaksi tatap muka</p>	

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
				yang sensitif dalam proses kebijakan dari bawah ke atas. Hasil penelitian ini juga membuat kami mempertanyakan gagasan bahwa sebuah proyek berhasil hanya karena demarkasi berhasil.	
2 3	Gregorius Agung Setyonugroho, Norio Maki	Policy implementation model review of the post-disaster housing reconstruction in Indonesia a case study: Aceh, Yogyakarta,	Deskriptif Kualitatif	Kebijakan publik memiliki peran penting dalam sistem penanggulangan bencana di Indonesia untuk menentukan kehidupan para korban	2024

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
		and Lombok		bencana. Terbitnya Undang- Undang Penanggula ngan Bencana Indonesia No. 24 tahun 2007 dan peraturan turunannya secara komprehen sif mengatur kegiatan sebelum dan sebelum dan sesudah bencana. studi tinjauan ini akan mengklarifi kasi pengemban gan kebijakan pemerintah Indonesia dan kebijakan dan implement asi strategi pemerintah	

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
				Indonesia dalam rekonstruksi perumahan pascabencana di Aceh, Yogyakarta, dan Lombok sebelum dan sesudah PB 24/2007 dengan menggunakan studi literasi dan survei lapangan untuk mengidentifikasi dokumentasi dan referensi proses rekonstruksi, untuk melihat kondisi perumahan pascabencana kondisi perumahan pasca rekonstruksi pada tahun 2023, dan	

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
				<p>melakukan wawancara dengan penerima manfaat, pemerintah terkait, pemerintah, dan staf LSM. Pendekatan teori implementasi kebijakan publik digunakan untuk menganalisis reformasi sistem penanggulangan bencana di Indonesia dan proses implementasi dan proses implementasi rekonstruksi perumahan pascabencana untuk menentukan signifikansi</p>	

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
				<p>dan dampaknya . Temuan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan rekonstruksi perumahan pascabencana akan mencapai hasil yang lebih baik dengan mengkolaborasi pendekatan berbasis kontraktor dan berbasis masyarakat ke dalam berbasis masyarakat antara penerima manfaat dan pemangku kepentingan</p>	
24	Olivier Sykes, Andreas Schulze Baing	Regional and territorial development	Deskriptif Kualitatif	penelitian ini menunjukkan akan pentingnya	Local Economy 2017, Vol. 32(3) 240–256 ! The Author(s) 2017

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
		ment policy after the 2016 EU referendum – Initial reflections and some tentative scenarios		peran kebijakan regional Uni Eropa di kawasan dan komunitas Inggris, serta menyerukan perhatian yang lebih besar pada tahun-tahun mendatang terhadap dampak distribusi teritorial dari keluarnya Inggris dari Uni Eropa.	
25	Ugo Fratesi & Fiona G. Wishlade	The impact of European Cohesion Policy in different contexts	Dekriptif Kualitatif	Penelitian ini meneliti mengenai Dampak kebijakan kohesi Eropa dalam konteks berbeda. Kebijakan kohesi – yang merupakan pilar	ISSN: 0034-3404 19 Mei 2017

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
				<p>penting Uni Eropa – selalu menjadi subyek penelitian dan perdebatan luas karena anggarannya yang besar dan peran supranasional Komisi Eropa. Penelitian terbaru mengakui bahwa dampak kebijakan kohesi tidak seragam. Minat akademis semakin beralih dari upaya untuk menilai 'dampak total' dengan penekanan pada 'faktor pengondisian' yang menjelaskan</p>	

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
				n di mana, kapan, dan bagaimana kebijakan tersebut efektif. Hal ini memberikan ide-ide yang dapat berkontribusi pada desain kebijakan.	
26	Stefan Gänzle ¹ , Dominic Stead ² , Franziska Sielker ³ and Tobias Chilla	Macro-regional Strategies, Cohesion Policy and Regional Cooperation in the European Union: Towards a Research Agenda	Dekriptif Kualitatif	Penelitian ini bertujuan untuk mempertimbangkan penelitian mengenai subjek Kawasan Makro, Kebijakan Kohesi dan Kerjasama Regional Uni-Eropa hingga saat ini, merefleksikan titik awal konseptual dan menyoroti arah baru untuk	2018

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
				penelitian masa depan dalam ilmu politik.	
2 7	Riccardo Crescenzi, Mara Giua	The EU Cohesion Policy in context: Does a bottom-up approach work in all regions?	Kuantitatif	Makalah ini melihat Uni Eropa sebagai laboratorium untuk mempelajari bagaimana kebijakan yang 'bertarget spasial' (yaitu Kebijakan Kohesi dan Pembangunan Pedesaan Uni Eropa) berinteraksi dengan kebijakan sektoral yang 'buta spasial' (yaitu Kebijakan Pertanian Bersama), yang bersama-sama membentuk dinamika	DOI: 10.1177/0308518X16658291 2016

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
				<p>pertumbuhan regional. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan bottom-up tidak selalu merupakan pendekatan terbaik terhadap kohesi teritorial. Kebijakan yang bersifat top-down (dari atas ke bawah) mungkin – dalam beberapa kasus – efektif untuk menyalurkan sumber daya ke daerah-daerah yang paling miskin secara sosial-ekonomi. Kohesi teritorial memerlukan</p>	

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
				n integrasi dan koordinasi yang fleksibel baik dari pendekatan bottom-up maupun top-down.	
28	Arjan H Schakel	Multi-level governance in a 'Europe with the regions'		Penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola multilevel juga memperlihatkan keterlibatan regional dalam urusan UE di negara-negara anggota. Berbeda dengan perspektif yang berfokus pada pengambilan keputusan formal oleh pemerintah pusat, tata kelola multilevel	DOI: 10.1177/1369148120937982 2020

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
				<p>mengungkap adanya pembagian wewenang yang signifikan antara aktor-aktor pemerintah di dalam dan di luar negara bahkan dalam kasus di mana hak formal untuk mengambil keputusan berada di tangan pemerintah nasional atau legislator Uni Eropa. peneliti berargumentasi bahwa konsep pemerintahan multilevel adalah kunci untuk memahami perkembangan</p>	

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
				<p>gan dalam pemerintahan tiga tingkat UE karena konsep ini mengarahkan perhatian ilmiah pada insentif bagi daerah untuk terlibat dalam urusan UE dan bagi pemerintah nasional serta lembaga-lembaga UE untuk berbagi kewenangan mereka dengan daerah.</p>	
29	Anna Brigevich	Regional identity and support for integration: An EU-wide comparison of parochia		<p>penelitian ini mengkaji dampak dari tiga jenis identitas regional tingkat individu terhadap dukungan</p>	DOI: 10.1177/1465165187937082018

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
		lists, inclusive regionalist, and pseudo-exclusivists		integrasi: parokialisme (regionalisme eksklusif), regionalisme inklusif, dan regionalisme pseudo-eksklusif. Bertentangan dengan ekspektasi ilmiah, analisis multilevel mengungkapkan bahwa regionalis inklusif sama-sama skeptis terhadap Euro seperti halnya regionalis parokial. Secara umum, identitas regional mengurangi dukungan terhadap integrasi	

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
				kecuali jika hal tersebut secara jelas digabungkan dengan identitas supranasional. Temuan ini berlaku bahkan di negara-negara minoritas, dimana respondennya, secara keseluruhan, kurang ramah terhadap Euro.	
30	Clayton Hazvinei Vhumbunu	African Regional Economic Integration in the Era of Globalisation: Reflecting on the Trials, Tribulations, and Triumphs		Penelitian ini mengkaji integrasi regional Afrika—yang lahir pada fase dekolonisasi, evolusinya, dan dinamika yang menyertainya—dengan latar	ISSN: 1818-6874 21 Maret 2019

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
				<p>belakang globalisasi yang semakin intensif. Laporan ini secara kritis menganalisis kompleksitas yang terkait dengan integrasi ekonomi Afrika sambil mempertimbangkan tantangan, keberhasilan, dan kemajuan yang telah dicapai sejauh ini. Fokusnya adalah menganalisis bagaimana visi, komisi, dan kelalaian OAU dan AU, pemimpin politik, masyarakat</p>	

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
				<p>sipil, dan pemain internasional yang berbeda— dan sering kali tumpang tindih — telah membentuk dan memengaruhi sifat, bentuk, isi, dan arah kebijakan. agenda integrasi kontinental sejak awal melalui percepatan arus globalisasi. Temuan-temuan yang disajikan dalam artikel ini memfasilitasi pemahaman tentang cobaan, kesengsaraan, dan kemenangan integrasi</p>	

No	Nama Penulis	Judul	Metode	Hasil	Publikasi Jurnal
Penelitian Terkait Implementasi Kebijakan					
				ekonomi regional Afrika, yang merupakan hal mendasar dalam mewujudkan visi dan impian Afrika.	

2.2 Teori Yang Digunakan

2.2.1 Administrasi Publik

Istilah Administrasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin (Yunani) yang terdiri atas dua kata yaitu “ad” dan “*ministrate*” yang berarti “*to serve*” yang dalam Bahasa Indonesia berarti melayani atau memenuhi. Sedangkan pendapat A. Dunsire yang dikutip ulang oleh Keban (2008:2) "administrasi diartikan sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan implementasi, kegiatan pengarah, penciptaan prinsip-prinsip implementasi kebijakan publik, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individual dan kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa publik, dan sebagai arena bidang kerja akademik dan teoritik (Malawat, 2022).

Pengertian Publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kesamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki (Syafi'ie dkk dalam Pasolong, 2011:6).

Administrasi publik, menurut Chandler dan Plano dalam Keban (2008:4) adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Selain itu, Keban juga menyatakan bahwa istilah Administrasi Publik menunjukkan bagaimana pemerintah berperan sebagai agen tunggal yang berkuasa atau sebagai regulator, yang aktif dan selalu berinisiatif dalam mengatur atau mengambil langkah dan prakarsa, yang menurut mereka penting atau baik untuk masyarakat karena diasumsikan bahwa masyarakat adalah pihak yang pasif, kurang mampu, dan harus tunduk dan menerima apa saja yang diatur pemerintah (Arkum et al., 2023).

Teori Administrasi menjelaskan upaya-upaya untuk mendefinisikan fungsi universal yang dilakukan oleh pimpinan dan asas-asas yang menyusun praktik kepemimpinan yang baik. Henry Fayol (1841-1925) menggunakan pendekatan atas manajemen administrasi, yaitu suatu pendekatan dari pimpinan atas sampai pada tingkat pimpinan terbawah.

Fayol melahirkan tiga sumbangan besar bagi administrasi dan manajemen yaitu (1) aktivitas organisasi, (2) fungsi atau tugas pimpinan, (3) prinsip-prinsip administrasi atau manajemen. Selanjutnya Fayol mengemukakan prinsip-prinsip administrasi yaitu :

- a. Pembagian pekerjaan, prinsip ini sama dengan pembagian tenaga kerja menurut Adam Smith, spesialisasi meningkatkan hasil yang membuat tenaga kerja lebih efisien.
- b. Wewenang. Manajer harus memberi perintah, wewenang akan membuat mereka melakukan dengan baik
- c. Disiplin. Tenaga kerja harus membantu dan melaksanakan aturan yang ditentukan oleh organisasi.
- d. Kesatuan komando, Setiap tenaga kerja menerima perintah hanya dari yang berkuasa.
- e. Kesatuan arah, Beberapa kelompok aktivitas organisasi yang mempunyai tujuan yang sama dapat diperintah oleh seorang manajer menggunakan satu rencana. Mengarahkan kepentingan individu untuk kepentingan umum.
- f. Kepentingan setiap orang, pekerja atau kelompok pekerja tidak dapat diutamakan dari kepentingan organisasi secara keseluruhan.
- g. Pemberian upah, pekerja harus dibayar dengan upah yang jelas untuk pelayanan mereka.
- h. Pemusatan. Berhubungan pada perbandingan yang mana mengurangi keterlibatan dalam pengambilan keputusan
- i. Rentang Kendali, garis wewenang dari manajemen puncak pada tingkatan di bawahnya merepresentasikan rantai saklar.
- j. Tata tertib, orang dan bahan-bahan dapat ditempatkan dalam hal yang tepat dan dalam waktu yang tepat.
- k. Keadilan, manajer dapat berbuat baik dan terbuka pada bawahnya.

- l. Stabilitas pada jabatan personal, perputaran yang tinggi merupakan ketidakefisiensian.
- m. Inisiatif, tenaga kerja yang menyertai untuk memulai dan membawa rencana akan menggunakan upaya pada tingkat tinggi.
- n. Rasa persatuan, kekuatan promosi tim akan tercipta dari keharmonisan dan kesalahan dalam organisasi.

Teori administrasi menurut William L. Morrow sebagai berikut :

- a. Teori Deskriptif adalah teori yang menggambarkan apa yang nyata dalam sesuatu organisasi dan memberikan postulat mengenai faktor-faktor yang mendorong orang berperilaku.
- b. Teori Perspektif, adalah teori yang menggambarkan perubahan-perubahan di dalam arah kebijakan publik, dengan mengeksploitasi keahlian birokrasi. Penekanan teori ini adalah untuk melakukan pembaharuan, melakukan koreksi dan memperbaiki proses pemerintahan.
- c. Teori Normatif, pada dasarnya teori mempersoalkan peranan birokrasi. Apakah peranan birokrasi dipandang di dalam pengembangan kebijakan dan pembangunan politik, atautkah peranan birokrasi dimantapkan, diperluas atau dibatasi.
- d. Teori asuntif, adalah teori yang memusatkan perhatiannya pada usaha-usaha untuk memperbaiki praktik administrasi. Untuk mencapai tujuan ini, teori asumsi berusaha memahami hakikat manusiawi yang terjadi di lingkungan birokratis.
- e. Teori instrumental, adalah teori yang bermaksud untuk melakukan konseptualisasi mengenai cara-cara untuk memperbaiki teknik manajemen, sehingga dapat dibuat sasaran

kebijakan secara lebih realistis. Teori ini menekankan alat, teknik dan peluang untuk melaksanakan nilai-nilai yang telah ditentukan.

Menurut Stephen P. Robbins, teori administrasi meliputi :

- a. Teori Hubungan Manusia. Teori ini dirintis oleh Elton Mayo. Pengembangan Teori Mayo didasarkan pada penemuannya selama memimpin proyek. Mayo bermaksud menguji hubungan antara produktivitas dengan lingkungan fisik. Mayo menangkap bahwa norma-norma sosial, justru merupakan faktor kunci dalam perilaku kerja individual. Karenanya, rangsangan kenaikan upah tidak memacu pekerja untuk bekerja lebih produktif.
- b. Teori Pengambilan Keputusan. Dalam pengambilan keputusan para pemikir menyarankan dipergunakannya statistik, model optimasi, model informasi, dan simulasi. Disamping itu dapat juga dimanfaatkan pengetahuan-pengetahuan yang berasal dari *linear programming, critical path scheduling, inventory models, site location models*, serta berbagai bentuk *resource allocation models*.
- c. Teori Perilaku. Teori ini bermaksud untuk menintegrasikan semua pengetahuan mengenai anggota organisasi, struktur dan prosesnya. Teori ini memahami pentingnya faktor perilaku manusia sebagai alat utama untuk mencapai tujuan.
- d. Teori Sistem. Dalam teori ini, organisasi dipandang sebagai suatu sistem yang menampilkan karakteristiknya sebagai penerima masukan, pengolah dan penghasil.

- e. Teori Kontigensi. Pada awalnya teori ini dipergunakan pada pengembangan organisasi yang dirancang secara optimal dapat mengadaptasi teknologi dan lingkungan. Teori kontigensi diangkat untuk mencari beberapa karakteristik umum yang melekat pada situasi khusus.

Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Siagian, 2009:4). The Lianggie (dalam Pasalong, 2011:3) mendefinisikan administrasi adalah rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di dalam kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu.

Pasalong (2011:3) Administrasi adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan yang efisien, efektif, dan rasional. Selanjutnya ia menyatakan administrasi mempunyai dua dimensi yaitu dimensi karakteristik dan dimensi unsur-unsur. Dimensi karakteristik yang melekat pada administrasi yaitu efisien, efektif dan rasional sedangkan dimensi unsur-unsur administrasi yaitu:

- a. Adanya tujuan atau sasaran yang ditentukan sebelum melaksanakan suatu pekerjaan
- b. Adanya kerjasama baik sekelompok orang atau lembaga pemerintah maupun lembaga swasta
- c. Adanya sarana yang digunakan oleh sekelompok atau lembaga dalam melaksanakan tujuan yang hendak dicapai.

2.2.2 Kebijakan Publik

Kebijakan adalah sebuah instrumen pemerintah, bukan saja dalam arti *government* yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula *governance* yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara. Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideology dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara (Raviansyah dkk, 2022).

Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt, 1973 dalam Leo Agustino (2006:6) dalam perspektif mereka mendefinisikan kebijakan publik sebagai keputusan tetap yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repetisi) tingkahlaku dari mereka yang membuat dan dari mereka mematuhi keputusan.

Adapun dari Carl Friedrich, 1969 dalam Leo Agustino (2006:7) yang mengatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan terutama dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Menurut Bridgman dan Davis, 2005 dalam Edi Suharto (2007:3) menerangkan kebijakan publik pada umumnya mengandung pengertian mengenai '*whatever government choose to do or not to do*'. Artinya,

kebijakan publik adalah ‘apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan’. Sedangkan menurut Hogwood dan Gunn, 1990 Edi Suharto (2007:4) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu. Ini tidak berarti bahwa makna ‘kebijakan’ hanyalah milik atau dominan pemerintah saja. Organisasi-organisasi non-pemerintah, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Sosial (Misalnya Karang Taruna, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga/PKK) dan lembaga- lembaga sukarela lainnya memiliki kebijakan-kebijakan pula.

Menurut Bridgeman dan Davis, 2004 dalam Edi Suharto (2007:5) menerangkan bahwa kebijakan publik setidaknya memiliki tiga dimensi yang saling bertautan, yakni sebagai tujuan (*objective*), sebagai pilihan tindakan yang legal atau sah secara hukum (*authoritative choice*), dan sebagai hipotesis (*hypothesis*).

1. Kebijakan publik sebagai tujuan

Kebijakan publik pada akhirnya menyangkut pencapaian publik. Artinya, kebijakan publik adalah serangkaian tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah.

2. Kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang legal

Pilihan tindakan dalam kebijakan bersifat legal atau otoritatif karena dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintahan. Keputusan itu mengikat para pegawai negeri untuk bertindak atau mengarahkan pilihan tindakan atau kegiatan seperti menyiapkan rancangan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dipertimbangkan oleh

parlemen atau mengalokasikan anggaran guna mengimplementasikan program tertentu.

3. Kebijakan publik sebagai hipotesis

Kebijakan dibuat berdasarkan teori, model atau hipotesis mengenai sebab dan akibat. Kebijakan-kebijakan senantiasa bersandar pada asumsi-asumsi mengenai perilaku. Kebijakan selalu mengandung insentif yang mendorong orang untuk melakukan sesuatu. Kebijakan juga selalu memuat disinsentif yang mendorong orang tidak melakukan sesuatu. Kebijakan harus mampu menyatukan perkiraan-perkiraan mengenai keberhasilan yang akan dicapai dan mekanisme mengatasi kegagalan yang mungkin terjadi.

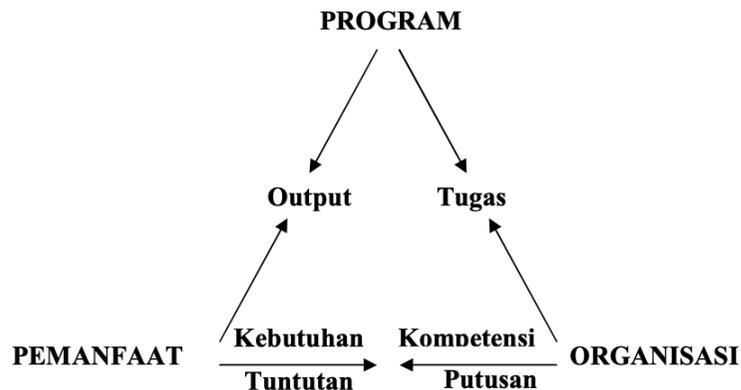
Dalam kaitanya dengan definisi-definisi tersebut di atas maka dapat disimpulkan beberapa karakteristik utama dari suatu definisi kebijakan publik. Pertama, pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada perilaku yang berubah atau acak. Kedua, kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daripada keputusan yang terpisah-pisah. Ketiga, kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat, bukan apa yang dimaksud dikerjakan atau akan dikerjakan. Keempat, kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan, secara negatif, kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak

melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan. Kelima, kebijakan publik paling tidak secara positif, didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah (Nalien, 2021b).

2.2.3 Implementasi Kebijakan/Program

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi kebijakan dari sudut pandang teori siklikal (*cyclical theory*) maka implementasi itu akan diperlukan sebagai suatu tahapan penting yang berlangsung dari proses kebijakan, terutama setelah wacana legal formal, biasanya berupa undang-undang, peraturan, ketetapan, atau bentuk-bentuk produk lainnya, dianggap sudah usai (Dewi, 2019).

Dalam arti seluas-luasnya, implementasi juga sering dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama diantara beragam pemangku kepentingan (*stakeholders*), aktor, organisasi (*public atau privat*), prosedur, dan teknik secara sinergis yang digerakan untuk bekerjasama guna menerapkan kebijakan kearah tertentu yang dikehendaki (Agustian et al., 2023).



Gambar 2.1
Model kesesuaian Korten

Sumber : Haedar Akib dan Antonius Tarigan (2000: 12)

Salah satu model implementasi program yakni model yang diungkapkan oleh David C. Korten. Model ini memakai pendekatan proses pembelajaran dan lebih dikenal dengan model kesesuaian implementasi program. Korten menggambarkan model ini berintikan tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan program yaitu program itu sendiri, pelaksanaan program, dan kelompok sasaran program. Korten menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program. Pertama, kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). Kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi

untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program (Pramono, 2020).

Berdasarkan pola yang dikembangkan Korten, dapat dipahami bahwa kinerja program tidak akan berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan kalau tidak terdapat kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan. Hal ini disebabkan apabila output program tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran, jelas output tidak dapat dimanfaatkan. Jika organisasi pelaksana program tidak memiliki kemampuan melaksanakan tugas yang disyaratkan oleh program, maka organisasinya tidak dapat menyampaikan output program dengan tepat. Atau, jika syarat yang ditetapkan organisasi pelaksana program tidak dapat dipenuhi oleh kelompok sasaran, maka kelompok sasaran tidak mendapatkan output program. Oleh karena itu, kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan mutlak diperlukan agar program berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

Terkait landasan dan mutu implementasi, menurut Islamy dalam buku Maryono (2010: 43) yang berjudul *Menakar Kebijakan RSBI: Analisis Kritis Studi Implementasi*, untuk bisa melihat apakah proses implementasi telah berjalan dengan baik ada kriteria yang perlu diperhatikan, beberapa diantaranya yakni :

1. Apakah unit pelaksana teknis telah disiapkan ?
2. Apakah pelaksana kebijakan telah mengerti akan rencana, tujuan, dan sasaran kebijakan ?
3. Apakah aktor-aktor utama telah ditetapkan dan siap menerima tanggung jawab pelaksanaan kebijakan tersebut ?
4. Apakah koordinasi pelaksanaan telah dilakukan dengan baik ?

5. Apakah hak dan kewajiban, kekuasaan dan tanggung jawab telah diberikan dan dipahami serta dilaksanakan dengan baik oleh pelaksana kebijakan ?
6. Apakah kriteria penilaian keberhasilan pelaksanaan kebijakan telah ada, jelas, dan diterapkan dengan baik?

Berbagai pertanyaan di atas dapat menjadi bahan dan pedoman dalam proses pencarian data dalam upaya untuk mendeskripsikan implementasi penggabungan Desa/Kelurahan pada wilayah terdampak lumpur Lapindo di Kabupaten Sidoarjo. Kesimpulannya program merupakan interpretasi dari sebuah kebijakan pemerintah yang berisi kumpulan instruksi, yang dibuat untuk memperbaiki permasalahan yang sedang berkembang. Program harus ada dalam mengimplementasikan suatu kebijakan.

A. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Bambang Sunggono, implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu:

a. Isi kebijakan

Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. *Kedua*, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. *Ketiga*, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. *Keempat*, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan

publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya-sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia (Muhammad Firyal & Widya Kurniati, 2018).

b. Informasi

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

c. Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

d. Pembagian Potensi

Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas (Bambang Sunggono, 1994 : 149-153).

Adanya penyesuaian waktu khususnya bagi kebijakan-kebijakan yang kontroversial yang lebih banyak mendapat penolakan warga

masyarakat dalam implementasinya. Menurut James Anderson yang dikutip oleh Bambang Sunggono, faktor-faktor yang menyebabkan anggota masyarakat tidak mematuhi dan melaksanakan suatu kebijakan public (Marwiyah, 2022), yaitu :

- a. Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum, dimana terdapat beberapa peraturan perundang-undangan atau kebijakan publik yang bersifat kurang mengikat individu-individu;
- b. Karena anggota masyarakat dalam suatu kelompok atau perkumpulan dimana mereka mempunyai gagasan atau pemikiran yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan hukum dan keinginan pemerintah;
- c. Adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat diantara anggota masyarakat yang mencenderungkan orang bertindak dengan menipu atau dengan jalan melawan hukum;
- d. Adanya ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan “ukuran” kebijakan yang mungkin saling bertentangan satu sama lain, yang dapat menjadi sumber ketidakpatuhan orang pada hukum atau kebijakan publik;
- e. Apabila suatu kebijakan ditentang secara tajam (bertentangan) dengan sistem nilai yang dianut masyarakat secara luas atau kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. (Bambang Sunggono, 1994 : 144-145).

Sementara menurut Darwin (1999) menyatakan bahwa ada 5 aspek yang menjadi penghambat implementasi kebijakan, yaitu:

a. Kepentingan

Dalam proses implementasi suatu kebijakan publik seringkali menimbulkan konflik dari kelompok sasaran atau masyarakat, artinya terbuka peluang munculnya kelompok tertentu diuntungkan (*gainer*), sedangkan dipihak lain implementasi kebijakan tersebut justru merugikan kelompok lain (*looser*), (Agus Dwiyanto, 2000). Implikasinya, masalah yang muncul kemudian berasal dari orang-orang yang merasa dirugikan. Upaya untuk menghalang-halangi, tindakan complain bahkan benturan fisik biasa saja terjadi. Singkatnya, semakin besar konflik kepentingan yang terjadi dalam implementasi kebijakan publik, maka semakin sulit pula proses implementasi nantinya, demikian pula sebaliknya (Pramono, 2020).

b. Azas Manfaat

Dalam konteks pemerintahan yang efektif, pemerintah haruslah menyelesaikan persoalan-persoalan, walaupun tidak bisa dikatakan seluruh persoalan, karena keterbatasan diri pemerintah sendiri, untuk kemudian memberdayakan masyarakat atau melalui LSM dan organisasi lainnya untuk menyelesaikan persoalan mereka yang muncul dalam masyarakat. Pada tataran “menyelesaikan persoalan” tersebut, artinya kebijakan sebagai upaya intervensi pemerintah harus bermanfaat bagi masyarakat baik langsung atau tidak langsung, dimana manfaat itu bagi pemerintah sendiri akan

berdampak sangat positif. Jika dilihat dari aspek bermanfaat atau tidak, maka semakin bermanfaat implementasi kebijakan publik, dengan sendirinya dalam proses implementasi nantinya akan lebih mudah, mudah dalam arti untuk waktu yang tidak begitu lama implementasi, sebaliknya bila tidak bermanfaat, maka akan sulit dalam proses implementasi lebih lanjut (Igirisa, 2022).

c. Budaya

Aspek lain yang harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan publik adalah perubahan perilaku kelompok sasaran atau masyarakat, maksudnya sebelum implementasi kebijakan kelompok sasaran atau masyarakat melakukan sesuatu dengan pola implementasi kebijakan terdahulu. Ketika suatu kebijakan baru diimplementasikan, terjadi perubahan baik dalam finansial, cara atau tempat lain sebagainya. Perubahan tersebut akan menimbulkan resistensi dari kelompok sasaran. Masalahnya, lebih banyak implementasi kebijakan yang menuntut perubahan perilaku, baik sedikit atau banyak, artinya pengambil kebijakan seharusnya memilih alternatif kebijakan yang paling kecil menimbulkan pengaruh pada perubahan perilaku kelompok sasaran atau masyarakat.

d. Aparat Pelaksana

Aparat pelaksana atau implementor merupakan faktor lain yang menentukan apakah satu kebijakan publik sulit atau tidak diimplementasikan. Komitmen untuk berperilaku sesuai

tujuan kebijakan penting dimiliki oleh aparat pelaksana. Oleh Darwin (1999) mengatakan bahwa dalam hal ini diperlukan pengembangan aturan yang jelas dan sistem monitoring dan kontrol yang efektif dan transparan yang dapat mencegah kemungkinan terjadinya perilaku aparat yang berlawanan dengan tujuan publik tersebut. Selain itu, masyarakat perlu diberdayakan agar lebih kritis dalam menyikapi perilaku aparat yang menyimpang.

Perlu juga dipraktekkan, pilihan program sebagai upaya mengimplementasikan kebijakan in-built mekanisme yang menjamin transparansi dan pengawasan, hal ini penting untuk mengarahkan perilaku aparat. Selain itu, kualitas aparat dalam melaksanakan proses implementasi pun menjadi kendala yang sering dijumpai, terutama menyangkut implementasi kebijakan yang menumbuhkan keterampilan khusus (Maulana, 2019).

e. Anggaran

Suatu program akan dapat terimplementasi dengan baik jika didukung oleh sumber daya yang memadai, dalam hal ini dapat berbentuk dana, peralatan teknologi, dan sarana serta prasarana lainnya. Kesulitan untuk melaksanakan satu program terkait erat dengan beberapa hal yang disebut terakhir, bila sumber daya yang ada tidak mendukung, maka implementasi program tersebut nantinya akan menemui kesulitan.

Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai manfaat positif bagi anggota-anggota masyarakat.

Dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. Sehingga apabila perilaku atau perbuatan mereka tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara, maka suatu kebijakan publik tidaklah efektif (Raviansyah dkk, 2022).

Dari kedua pendapat ahli diatas terkait dengan faktor-faktor penghambat Implementasi Kebijakan, maka penulis menjadikan pendapat dari Darwin (1999) sebagai faktor-faktor penghambat Implementasi Kebijakan yaitu :

- a. Kepentingan
- b. Azas manfaat
- c. Budaya
- d. Aparat pelaksana
- e. Anggaran

Karena sangat sesuai dengan kondisi dan keterbutuhan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

2.2.4 Konsep Penggabungan Desa/Kelurahan

Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) merupakan salah satu peluang strategis untuk mengatasi problema ketimpangan pembangunan dan mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Oleh karena itu, tujuan pembentukan daerah otonom baru akan dapat terwujud jika ada kesesuaian antara semua elemen yang ada dalam mengawal proses pembentukan daerah otonom baru tersebut. Pemahaman ini terkait pula dengan kemampuan dan kemandirian daerah dan lebih luas lagi, menurut Mariana dan Paskarina (2008:192) bahwa “penataan wilayah juga mencakup kemampuan melaksanakan

fungsi-fungsi pemerintahan secara efektif dan efisien dengan menggunakan segala potensi dan sumber daya yang tersedia.”. Sejalan dengan itu, Wasistiono (2012:3) menyatakan bahwa “penataan daerah yang ideal mencakup kebijakan pembentukan, penggabungan, dan penyesuaian daerah otonom serta evaluasi kemampuan dan pembinaan daerah otonom.”.

Fakta penting terkait dengan penggabungan, penghapusan dan pembentukan desa adalah luasan geografis dan demografis Desa menjadi isu penting dalam otonomi Desa, terutama sebagai basis kekuatan sumber daya lokal. Berdasarkan kalkulasi nominal, Desa umumnya mempunyai keterbatasan luas wilayah, jumlah penduduk, potensi Desa, dan lain-lain. Syarat-syarat penggabungan atau pemecahan Desa di dasarkan pada luas wilayah, jumlah penduduk dan kekuatan untuk membiayai dirinya sendiri. Namun berdasarkan hasil pengkajian dikemukakan bahwa penggabungan atau pemecahan Desa tidak disenangi oleh masyarakat. Penggabungan atau pemecahan Desa dapat menyebabkan lemahnya ikatan masyarakat yang ada di dalam Desa (Desa- verband), bahkan dapat mengakibatkan lemahnya hubungan antara masyarakat dan kepala Desanya.

Menurut Soetardjo Kartohadikoesoemo sebagaimana dikutip Ateng Syafrudin dan Suprin Na’a adalah suatu daerah hukum dapat dikategorikan sebagai desa apabila memenuhi syarat-syarat:

1. Mempunyai wilayah sendiri yang ditentukan dengan batas-batas yang sah;
2. Berhak untuk mengurus dan mengatur pemerintahan dan rumah tangga sendiri;

3. Berhak memilih atau mengangkat kepada daerahnya atau majelis pemerintahan sendiri;
4. Berhak mempunyai harta benda dan sumber keuangan sendiri;
5. Berhak atas tanah sendiri;
6. Berhak untuk memungut pajak sendiri.

Dalam Pasal 19 dan 103 UU Desa disebutkan, Desa dan Desa Adat mempunyai empat kewenangan, meliputi :

- 1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul. Hal ini berbeda dengan perundang-undangan sebelumnya yang menyebutkan bahwa urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
- 2) Kewenangan lokal berskala Desa dimana desa mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur dan mengurus desanya. Berbeda dengan perundangundangan sebelumnya yang menyebutkan, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa.
- 3) Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa bukanlah kewenangan sisa (residu) yang dilimpahkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana pernah diatur dalam UndangUndang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan asas rekognisi dan subsidiaritas, kedua jenis kewenangan tersebut diakui dan ditetapkan langsung oleh UU Desa dan dijabarkan pada Peraturan Pemerintah.

Sedangkan Kewenangan lokal berskala Desa dalam Penjelasan Pasal 19 huruf b UU Desa adalah :

“Yang dimaksud dengan “kewenangan lokal berskala Desa” adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa, antara lain tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan Desa, embung Desa, dan jalan Desa.”

Kewenangan atau Hak Asal Usul dalam Penjelasan Pasal 19 huruf a UU Desa mencakup pengertian;

“Yang dimaksud dengan “hak asal usul” adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas Desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa“.

Kewenangan asal-usul yang diakui oleh negara meliputi : pengelolaan aset (sumberdaya alam, tanah ulayat, tanah kas Desa) dalam wilayah yurisdiksi Desa, pembentukan struktur pemerintahan

Desa dengan mengakomodasi susunan asli, menyelesaikan sengketa secara adat dan melestarikan adat dan budaya setempat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa penataan desa merupakan proses-proses pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dan penetapan desa. Dalam UU Desa, jika dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya, penataan desa dirumuskan dengan klausul yang lebih rinci. Pemerintah, sebagai pengusul rancangan UU Desa ini menyatakan bahwa perubahan mendasar yang diatur dalam regulasi ini adalah persyaratan dan mekanisme pembentukan desa yang diperketat.

Penataan Desa dalam Undang-Undang Desa dicantumkan pada 11 pasal yang ada, penataan desa dapat diuraikan menjadi beberapa sub tema yang terdiri dari :

- 1) Pemerintah sebagai subyek penataan desa.
- 2) Evaluasi sebagai basis penataan desa.
- 3) Tujuan Penataan Desa.
- 4) Ruang Lingkup Penataan Desa.
- 5) Prasyarat Penataan Desa, dan
- 6) Mekanisme Penataan Desa.

Dalam hal Pemerintah sebagai subyek penataan desa, tercantum dalam Pasal 7 ayat (1). Dijelaskan bahwa, penataan desa dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini Pemerintah memiliki otoritas untuk melakukan penataan desa. Namun demikian, karena dalam klausul ini digunakan kata “dapat” maka otoritas tersebut tidak bersifat

mutlak tetapi bersyarat. Ketentuan tentang persyaratan penataan desa diuraikan pada Pasal 8 hingga Pasal 12 UU Desa.

Dalam pembahasan RUU Desa di DPR, tujuan penataan desa secara spesifik disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri pada rapat kerja dengan Pansus DPR 4 April 2012, dimana disebutkan bahwa penataan desa bertujuan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, dan meningkatkan daya saing Desa.⁹⁴ Sementara rumusan tujuan penataan desa yang disepakati, tercantum dalam Pasal 7 ayat 3 UU Desa dimana penataan desa bertujuan untuk :

- a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa; dan
- e. meningkatkan daya saing Desa.

Norma ini menjadi arah dalam proses penataan desa, sehingga dalam pelaksanaan penataan desa diorientasikan untuk mencapai hal-hal sebagaimana dicantumkan dalam rumusan tujuan penataan desa tersebut. Searah dengan itu, tujuan penataan desa ini menjadi penting untuk menjadi pegangan dalam memaksimalkan fungsi-fungsi pemerintahan desa.

Ruang lingkup penataan desa dalam UU Desa sendiri dibagi dalam beberapa bagian sesuai dengan rumusan yang dicantumkan dalam Pasal 7 ayat (4), berupa :

- a. pembentukan;
- b. penghapusan;
- c. penggabungan;
- d. perubahan status; dan
- e. penetapan Desa.

Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil, kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas. Dalam perkembangannya sebuah Desa dapat diubah statusnya menjadi Kelurahan.

Sesuai dengan Nomer 73 Tahun 2005, Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah Kecamatan. Kelurahan dibentuk di wilayah Kecamatan. Pembentukan Kelurahan harus sekurang-kurangnya memenuhi syarat :

1. Jumlah Penduduk
2. Luas Wilayah
3. Bagian Wilayah Kerja
4. Sarana dan Prasarana Pemerintahan

Dan untuk wilayah kelurahan diatur dengan Ketentuan pada pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, mengatur bahwa kelurahan bisa dihapuskan jika sedikitnya jumlah penduduk yang tinggal tidak mencapai 4500 jiwa atau 900KK, tidak memiliki wilayah kerja yang dapat dijangkau. Tidak memiliki Sarana dan Prasarana yang memadai antara lain :

- a. Kantor Pemerintahan

b. Jaringan Perhubungan yang lancar

c. Fasilitas Umum yang memadai

Adapun syarat pembentukan kelurahan pada pasal 19 ayat (2) PP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan dilanjutkan pada pasal 23 ayat (1) s.d (5) disebutkan bahwa :

1. Penggabungan Kelurahan dapat dilakukan berupa penggabungan 2 (dua) kelurahan atau lebih yang bersanding dalam 1 (satu) wilayah kecamatan atau dalam wilayah kecamatan yang bersandingan.
2. Penggabungan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
 - a. Terjadi bencana yang mengakibatkan fungsi penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan
 - b. Terdapat kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan/atau
 - c. Tercapai kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD Kab/kota berdasarkan hasil kesepakatan antara seluruh kelurahan yang digabung.
3. Kelurahan yang digabung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan nama salah satu kelurahan yang bergabung atau menggunakan nama baru
4. Persyaratan pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) tidak berlaku untuk penggabungan kelurahan
5. Penggabungan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kab/Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung. Pemekaran dari satu Kelurahan menjadi dua Kelurahan atau lebih dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) Tahun penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kelurahan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri. Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/ Walikota melalui Camat.

Penataan daerah menurut Djohan dalam Syaifulloh (2017:23) memiliki 3 (tiga) dimensi yaitu Dimensi Politik, Dimensi Administrasi/Teknis dan Dimensi Kesenjangan Wilayah.

Menurut AF. Leemans ada tiga jenis amalgamasi: (a) merger; (b) aneksasi dan (c) redivisi wilayah. Merger atau peleburan dapat terjadi di dalam satu daerah otonom tanpa menimbulkan otonomi baru dan dapat pula antar daerah otonom yang tentu menghapuskan otonomi daerah mana menjadi satu kesatuan daerah otonom baru. Aneksasi merupakan peleburan sebagian dari wilayah pemerintahan kepada wilayah pemerintahan lain. Aneksasi dapat pula dari satu satuan dalam daerah otonom tertentu tanpa melibatkan satuan dari daerah otonom lainnya dan dapat pula satuan wilayah antar daerah otonom.

Berbeda dengan pendapat Talizuhulu Ndraha, mengatakan pembentukan daerah otonom merupakan persoalan hubungan kemanusiaan dengan negara. Dalam berotonom, ketidakmampuan atau melemahnya daerah otonom akibat kecilnya resources haruslah dikelola dengan baik terutama oleh pemerintah sebagai elemen

penyelenggara desentralisasi (pembentukan daerah otonom). Tanggung jawab pemerintah harus besar dalam memandirikan daerah serta memajukannya pula. Tapi pendekatan ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana demokrasi serta penyelenggaraan negara dapat mengajarkan pula kepada masyarakat local berotonomi tanpa adanya pengembangan indicator yang jelas bagi daerah otonom baru? Sebab itu Alan Norton (1994), dalam konteks pemberian otonomi daerah diperlukan penataan organisasi dan batas daerah yang memiliki dua pandangan; pertama, efektivitas demokrasi; kedua, jaminan skala ekonomi daerah.

2.3 Critical Review

Penelitian diatas merupakan penelitian yang relevamn dengan judul yang telah diambil oleh penulis. Berikut beberapa persamaan dan perbedaannya :

1. Darmi Saleh Harahap (2015) keterkaitan antara penelitian ini dan penulis terdapat pada proses penggabunagn beberapa wilayah Desa dan juga penggunaan pendekatan yang sama yaitu kualitatif, namun penggabungan itu juga merubah status Desa yang digabungkan menjadi Kelurahan (Salese et al., 2015)
2. Irvan Rizky Hutomo (2021) keterkaitan anatar penelitian ini dengan penulis terdapat pada peristiwa penggabungan Desa, namun perbedaannya terdapat pada pembahasan mengenai tanah bengkok pasca pembentukan, penghapusan, penggabungan Desa dan perubahan status Desa menjadi Kelurahan di Kabupaten Kendal (Hutomo, 2021)
3. Dr. Drs. H. Rahyunir Rauf, M.Si. (2016) ketertarikan penulis dengan jurnal ini yakni dalam penguatan kelembagaan pemerintahan Desa melalui pembentukan, penggabungan dan penghapusan Desa. Hal ini

sejalan dengan yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo dimana masih belum adanya peraturan yang menjadi payung hukum adanya peristiwa khusus sehingga perlu adanya peran masyarakat dan pemerintah daerah yang kuat dalam menyelesaikan permasalahan yang ada (Rauf, 2016).

4. Citra Firmadhani (2019), penulis memiliki ketertarikan dikarenakan kesamaan dalam permasalahan penggabungan Kelurahan untuk efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Untuk menganalisis efektivitas penggabungan kelurahan digunakan teori William N. Dunn yang mana memperhatikan dua faktor yaitu harapan masyarakat dan realisasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ditemukan bahwa penggabungan kelurahan belum efektif. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor penghambat, yaitu kelurahan tidak memiliki SOP, kurangnya jumlah aparatur kelurahan, berkurangnya dana operasional kelurahan dan ada beberapa masyarakat yang belum mengetahui tentang penggabungan kelurahan (Firmadhani, 2019).
5. Sudarsana, penulis tertarik dengan penelitian ini sebagai bahan acuan dalam pemekaran wilayah dalam hal ini Desa/Kelurahan induk yang wilayahnya digabungkan dengan Desa/Kelurahan terdampak lumpur panas di Sidoarjo. perbedaan penelitian ini yakni pemerintah daerah dapat menerapkan regulasi tentang pemekaran desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dikarenakan peristiwa pemekaran Desa disini tidak terdapat peristiwa khusus didalamnya (Sudarsana, 2015).
6. Erwin Fakhrul Alim (2019), penulis tertarik dengan penelitian ini terletak pada tujuan dari penggabungan Kelurahan di Kota Pekalongan yakni efisiensi anggaran. Efisiensi yang dimaksud adalah dengan

adanya penggabungan Kelurahan maka jumlah anggaran operasional dan belanja pegawai kelurahan yang dibutuhkan menjadi lebih sedikit dan sarana prasarana pendukung yang dibutuhkan lebih sedikit. Hal ini sejalan dengan apa yang terjadi pada kelurahan terdampak lumpur dimana pelaksanaan pemerintahan tetap berjalan tanpa adanya pelayanan kepada masyarakat, dimana anggaran terus dialokasikan kepada kelurahan terdampak demi terselenggaranya pemerintahan di Kelurahan (Alim, 2019).

7. Novia kristianti, penulis tertarik dengan penelitian ini dikarenakan penelitian ini mengkaji implikasi kebijakan penggabungan Kelurahan tahun 2015-2016 terhadap dinamika sosial dan politik di Kota Pekalongan dimana hal ini juga dapat berpengaruh dalam kebijakan penggabungan kelurahan di Kabupaten Sidoarjo. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implikasi dari kebijakan penggabungan kelurahan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan ini melahirkan konflik vertikal maupun horizontal, hal terbesar disebabkan karena kebijakan penggabungan kelurahan di Kota Pekalongan berdampak padaperubahan nomenklatur daerah. Perubahan nomenklatur dianggap menghilangkan sejarah oleh masyarakat Kota Pekalongan yang sangat menjunjung tinggi nilai kebudayaan (Kristianti, 2019).
8. Widya Surya Cendekiana, Andi Darmawansya, Muhammad Nur Iqbal Nurdin (2022), keterkaitan penulis dengan penelitian ini yakni kebijakan Pemerintah Pusat yang selaras hingga Pemerintah Daerah terkait dengan Covid-19. Adanya peraturan yang menjadi payung hukum bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan kebijakan tersebut menjadi faktor penentu keberhasilan dalam suatu kebijakan. Perbedaan

terletak pada metode yang digunakan oleh peneliti yakni hukum normative (Surya Cendekiana et al., 2022).

9. Alber Tanjung, Salma Yetti, Aldri Frinaldi, Syamsir (2024), perbedaan penelitian ini terletak pada metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni literature review. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pendidikan terhadap kebijakan publik, dimana hal ini sama seperti yang terjadi dalam ruang lingkup yang penulis teliti (Tanjung et al., 2023).
10. Darol Arkum, Widya Handini, Risky Kurniawan (2023), fokus penelitian ini yakni pada implementasi suatu kebijakan kepada masyarakat di Pangkalpinang dan cara untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan di Pangkalpinang. Dimana faktor terhambatnya implementasi kebijakan di Kota Pangkalpinang yakni kurangnya keterlibatan masyarakat sebagai penerima manfaat kebijakan tersebut. Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian yang sama dengan penulis yakni deskriptif kualitatif. Serta teori yang digunakan Teori Edward III dari Tilaar bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi empat variabel yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur dan birokrasi (Darol Arkum, Widya Handini, 2023).
11. Elisa Putri Kholifa, Farid Setiawan, Nurul Lahdilah Fitri (2022), penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yakni Implementasi kebijakan yang menggunakan Teori Edward III dari Tilaar bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi empat variabel yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur dan birokrasi). Metode yang digunakan pada penelitian ini sama dengan penulis yakni deskriptif kualitatif (Elisa Putri Kholifa, Farid Setiawan, 2022).

12. Ayunda Nabila Mauliddia dan Diana Hertati (2023), keterkaitan penulis dengan peneliti ini yakni pada metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan fokus analisis teori implementasi yang dikemukakan oleh Grindle yaitu isi kebijakan dan konteks kebijakan (Mauliddia & Hertati, 2023).
13. Dhanang Ksatrio Witjaksono, Sri Wibani (2022), keterkaitan penulis dengan penelitian ini yakni lokasi yang berada di Kabupaten Sidoarjo serta tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana Implementasi suatu kebijakan di Kabupaten Sidoarjo. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menganalisis enam faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn diantaranya adalah 1) Tujuan kebijakan dan standar yang jelas, 2) Sumber daya, 3) Kualitas hubungan interorganisasional, 4) Karakteristik lembaga/organisasi pelaksana, 5) Lingkungan politik, sosial, dan ekonomi, 6) Disposisi/tanggapan atau sikap para pelaksana (Witjaksono & Wibawani, 2023).
14. Elvira Mulya Nalien (2021), tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penghambat daripada implementasi kebijakan khususnya di Pemerintah Kota Bukittinggi. Merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini sama dengan yang digunakan oleh penulis yakni Teori Edward III dari Tilaar bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi empat variabel yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur dan birokrasi (Nalien, 2021b).
15. Alexander Kevin Tjoanto, Maria R.U.D. Tambunan (2022), penelitian ini memiliki kesamaan metode yang digunakan oleh penulis yakni

kualitatif. Tujuan dari penelitian ini yakni menganalisis berbagai faktor yang dapat memberikan tantangan dalam proses implementasi kebijakan dan strategi yang dapat digunakan Pemerintah Indonesia untuk mengatasi tantangan tersebut (Tjoanto & Tambunan, 2022).

16. Anggara Setya Saputra, Suryoto, Chamid Sutikno (2022), penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana proses implementasi kebijakan dilakukan dari sisi aturan, pihakpihak yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan, organisasi pelaksana kebijakan dan analisis lingkungan yang mempengaruhi proses pelaksanaan kebijakan. Perbedaan dalam penelitian ini terhadap penulis yakni penelitian ini mencoba melihat proses implementasi kebijakan dari sisi bottom up dimana peran masyarakat dan kelompok organisasi terlibat secara aktif dalam pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode yang sama dengan penulis yakni deskriptif kualitatif (Anggara Setya Saputra et al., 2022).
17. Susi Andriyani, Ariyanti (2023), keterikatan penulis dengan penelitian ini yakni implementasi suatu kebijakan di daerah. Metode yang digunakan oleh peneliti dalam jurnal ini juga sama seperti yang digunakan oleh penulis yakni metode penelitian kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini juga sama seperti penulis yakni Teori Edward III dari Tilaar bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi empat variabel yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur dan birokrasi (Susi Andriyani, n.d.).
18. Abd. Wahid, Suardi Mukhlis, Nirwana (2023), jenis penelitian ini deskriptif dengan metode kualitatif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan pada suatu organisasi perangkat daerah di Kabupaten Sinjai. Penelitian ini menggunakan model

implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Van Metter dan Van Horn yang terdiri dari aspek aspek ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik lembaga pelaksana, kecenderungan sikap (disposisi) pelaksana, komunikasi antara organisasi dan kegiatan serta ekonomi, sosial dan politik (Wahid et al., 2023).

19. Miftahul Aziz, Esty Asriyana Suryana (2023), penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kebijakan pemerintah yang mendukung implementasi kebijakan, melakukan analisis mendalam terhadap besarnya peluang, potensi serta hambatan yang ada dari suatu kebijakan (Miftahul Aziz, 2023).
20. Dimas Agustian, Marthen Patiung, Yoakin Rembu, Muhammad Nur, Samsul Ode, Surya Yudha Regif (2023), penelitian ini menggunakan kualitatif deduktif. Fokus utama dalam penelitian ini yakni menganalisis suatu implementasi kebijakan yang ada di Kabupaten Timor Tengah Utara (Agustian et al., 2023).
21. Boniface Oyugi, Zilper Audi-Poquillon, Sally Kendall, Stephen Peckham, Edwine Barasa (2024), penelitian ini menggunakan metode yang sama dengan penulis yakni kualitatif namun berbeda dalam pendekatan yang digunakan yakni eksplorasi. Penelitian ini menunjukkan keterkaitan implementasi kebijakan dengan aktor kebijakan yang diprioritaskan untuk memenuhi agenda kampanye politik di Kenya (Boniface Oyugi, Zilper Audi-Poquillon, Sally Kendall, Stephen Peckham, 2024).
22. Saira Tariq, Rubeena Zakir (2015), penelitian ini menggunakan metode kualitatif empiris. Studi ini berkontribusi untuk memahami arena praktik kebijakan Informasi berbasis Bukti di Pakistan. Mengatasi tantangan yang disorot dapat menginformasikan strategi untuk

meningkatkan penggunaan bukti dalam proses kebijakan untuk meningkatkan kinerja sistem kesehatan (Saira Tariq, 2015).

23. Asya Zhelyazkova, Eva Thomann, Eva Ruffing & Sebastiaan Princen (2023), Penelitian ini menganalisis pola, penyebab, dan konsekuensi Penerapan Kebijakan yang Berbeda (DPI) di Uni Eropa (UE). DPI adalah istilah umum untuk keragaman dalam kehadiran dan penggunaan kebijaksanaan selama proses dan hasil implementasi kebijakan hukum dan praktis di UE (Zhelyazkova et al., 2024).
24. Jarot Prianggoro, Agus Subianto, Sri Umiyati, Lunariana Lubis (2022), penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis suatu implementasi kebijakan serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan. Teori Merillee S. Grindle yang digunakan dalam penelitian ini dalam mendefinisikan keberhasilan implementasi kebijakan adalah Isi Kebijakan dan Konteks Implementasi (Prianggoro et al., 2022).
25. Rizal Bahroni, Margaretha Rumbekwan, Arwanto Harimas Ginting (2022), penelitian ini Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui pendekatan induktif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pelayanan perizinan usaha mikro kecil berbasis Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) berdasarkan implementasi kebijakan menurut teori Van Meter dan Van Horn di Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur (Ginting et al., 2022).
26. Rik Peeters, Cesar Rentería, Guillermo M. Cejudo (2023), penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana pengaruh implementasi kebijakan terhadap kapasitas informasi pemerintah di Amerika Serikat,

- Meksiko, dan Belanda pada program Vaksin Covid-19 (Peeters et al., 2023).
27. Eduardo Silva (2023), penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak kebijakan dari organisasi gerakan sosial dalam konflik atas mega proyek pembangunan, dengan fokus pada keterkaitan antara politik implementasi kebijakan dan upaya mereformasi Sistem Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (SEIA) Chili dari tahun 1994 hingga sekarang (Silva, 2023).
 28. Angelo Baglioni (2024), penelitian ini memberikan sebuah model sederhana dari implementasi kebijakan moneter, menganalisis kedua suku bunga (IRS) dan kebijakan pelonggaran kuantitatif (QE) (Baglioni, 2024).
 29. Erik Soderberg, Roy Liff (2023), penelitian ini menganalisis alasan dari temuan ini dengan menggunakan konsep penyelarasan kerangka kerja (*frame alignment*) (Söderberg & Liff, 2023).
 30. Gregorius Agung Setyonugroho, Norio Maki (2024), penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Implementasi kebijakan akan mempengaruhi kemungkinan diimplementasikan secara efektif untuk mencapai suatu tujuan (Setyonugroho & Maki, 2024).
 31. Olivier Sykes, Andreas Schulze Baing (2017), Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. penelitian ini menunjukkan akan pentingnya peran kebijakan regional Uni Eropa di kawasan dan komunitas Inggris, serta menyerukan perhatian yang lebih besar pada tahun-tahun mendatang terhadap dampak distribusi teritorial dari keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Olivier Sykes, 2017).

32. Ugo Fratesi & Fiona G. Wishlade (2017), penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini meneliti mengenai Dampak kebijakan kohesi Eropa dalam konteks berbeda. Kebijakan kohesi – yang merupakan pilar penting Uni Eropa – selalu menjadi subyek penelitian dan perdebatan luas karena anggarannya yang besar dan peran supranasional Komisi Eropa (Wishlade, 2017).
33. Stefan Gänzle, Dominic Stead, Franziska Sielker and Tobias Chilla (2018), penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mempertimbangkan penelitian mengenai subjek Kawasan Makro, Kebijakan Kohesi dan Kerjasama Regional Uni-Eropa hingga saat ini, merefleksikan titik awal konseptual dan menyoroti arah baru untuk penelitian masa depan dalam ilmu politik (Stefan Gänzle¹, Dominic Stead², 2018).
34. Riccardo Crescenzi, Mara Giua (2016), penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian ini melihat Uni Eropa sebagai laboratorium untuk mempelajari bagaimana kebijakan yang 'bertarget spasial' (yaitu Kebijakan Kohesi dan Pembangunan Pedesaan Uni Eropa) berinteraksi dengan kebijakan sektoral yang 'buta spasial' (yaitu Kebijakan Pertanian Bersama), yang bersama-sama membentuk dinamika pertumbuhan regional (Riccardo Crescenzi, 2016).
35. Arjan H Schakel (2020), penelitian ini mengungkapkan bahwa konsep pemerintahan multilevel adalah kunci untuk memahami perkembangan dalam pemerintahan tiga tingkat UE karena konsep ini mengarahkan perhatian ilmiah pada insentif bagi daerah untuk terlibat dalam urusan UE dan bagi pemerintah nasional serta lembaga-lembaga UE untuk berbagi kewenangan mereka dengan daerah (Schakel, 2020).

36. Anna Brigevich (2018), penelitian ini mengkaji dampak dari tiga jenis identitas regional tingkat individu terhadap dukungan integrasi: parokialisme (regionalisme eksklusif), regionalisme inklusif, dan regionalisme pseudo-eksklusif. Bertentangan dengan ekspektasi ilmiah, analisis multilevel mengungkapkan bahwa regionalis inklusif sama-sama skeptis terhadap Euro seperti halnya regionalis parokial. Secara umum, identitas regional mengurangi dukungan terhadap integrasi kecuali jika hal tersebut secara jelas digabungkan dengan identitas supranasional. Temuan ini berlaku bahkan di negara-negara minoritas, dimana respondennya, secara keseluruhan, kurang ramah terhadap Euro (Capello & Caragliu, 2021).
37. Clayton Hazvinei Vhumbunu (2019), Penelitian ini mengkaji integrasi regional Afrika—yang lahir pada fase dekolonisasi, evolusinya, dan dinamika yang menyertainya—dengan latar belakang globalisasi yang semakin intensif. Laporan ini secara kritis menganalisis kompleksitas yang terkait dengan integrasi ekonomi Afrika sambil mempertimbangkan tantangan, keberhasilan, dan kemajuan yang telah dicapai sejauh ini (Vhumbunu, 2019).
38. Frank Mattheis & Uwe Wunderlich (2017), Penelitian ini mengemukakan argumen bahwa keactoran, yang kami konsepkan dalam kaitannya dengan institusi, pengakuan dan identitas, adalah sebuah konsep relasional, bergantung pada konteks dan persepsi. Dengan menggunakan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan Pasar Bersama di Selatan (Mercosur) serta hubungannya dengan UE sebagai studi kasus, artikel ini menunjukkan bahwa kapabilitas aktor dari ketiga organisasi tersebut telah ditingkatkan sebagai hasil dari ASEAN-UE (Mattheis & Wunderlich, 2017).

39. Olivier Sykes, Andreas Schulze Baing (2017), penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. penelitian ini menunjukkan akan pentingnya peran kebijakan regional Uni Eropa di kawasan dan komunitas Inggris, serta menyerukan perhatian yang lebih besar pada tahun-tahun mendatang terhadap dampak distribusi teritorial dari keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Olivier Sykes, 2017).
40. Sebastian Blesse & Felix Roesel (2018), penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. penelitian ini menilai dampak fiskal dan politik dari penggabungan daerah dalam dua lingkungan kelembagaan yang berbeda: kabupaten bertindak secara otonom sebagai pemerintah daerah tingkat atas (Jerman), atau kabupaten sebagai cabang pemerintahan negara bagian yang terdesentralisasi (Austria). Penelitian ini menyimpulkan bahwa biaya politik jelas lebih besar daripada manfaat fiskal dari reformasi penggabungan daerah – terlepas dari kondisi kelembagaan yang mendasarinya (Roesel, 2018).
41. Falk Ebinger, Sabine Kuhlmann & Joerg Bogumil (2018), penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. penelitian ini memiliki kontribusi memberikan gambaran umum mengenai reformasi teritorial di Eropa, dengan fokus khusus pada Jerman Timur sebagai contoh yang menjanjikan untuk perbandingan antar negara. kemudian memberikan gambaran umum mengenai klasifikasi analitis reformasi-reformasi tersebut dan faktor-faktor konteks yang perlu dipertimbangkan dalam evaluasinya. Dan menganalisis literatur mengenai dampak kinerja kualitatif dari reformasi ini. Hasilnya menunjukkan bahwa reformasi teritorial mempunyai dampak positif yang signifikan terhadap kinerja fungsional, sementara dampaknya terhadap partisipasi dan integrasi memang bersifat ambivalen (Falk Ebinger, 2018).

42. Paweł Swianiewicz & Katarzyna Szmigiel-Rawska (2020), penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran atau mix method. Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang menjelaskan mengapa perilaku kota-kota yang akan digabungkan berbeda dari hasil penelitian sebelumnya. Temuan yang paling penting adalah bahwa mekanisme yang mencegah penimbunan sumber daya bersama akan efektif ketika peraturan lokal diterapkan pada merger (Paweł Swianiewicz, n.d.).

2.4 Kerangka Berpikir

